

KEPENTINGAN INDONESIA MALAYSIA THAILAND TERHADAP KERJASAMA LOCAL CURRENCY SETTLEMENT FRAMEWORK (LCS)

Hadi Nur Muta'ali¹

Abstract: *The study is to shows that the interests agreed upon by the three countries to strengthen national currencies and to avoid the risk of a currency collapse by reducing dependency on the use of dollars in each transaction in three countries and to facilitate and increase the volume of imports and exports in three countries using local currencies. In utilizing local currency settlement cooperation, communities and bussines people in three countries can make payment transactions directly without having to convert their money in dollars first. So people and businesses can easily spend their national money on payments in three countries. By continuing to use their national money, will be able to strengthen the value of the national currency itself if dollars increase.*

Keywords : *Indonesia, Malaysia, Thailand, Local Currency Settlement Framework*

Pendahuluan

Pada 23 Desember 2016, Indonesia Malaysia Thailand melakukan penandatanganan MoU sebagai bentuk tindaklanjut sebuah pembuatan kerangka kerjasama yang bernama *Local Currency Settlement Framework* (LCS). LCS adalah sebuah kerangka kerjasama untuk bersama-sama sepakat menggunakan mata uang lokal dalam melakukan transaksi ekspor dan impor dimasing-masing negara. (bi.go.id, 2017)

LCS juga merupakan sebuah penyelesaian transaksi perdagangan antara tiga negara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan dolar AS di masing-masing negara. Dalam kesepakatan tersebut hal ini bertujuan dalam melakukan transaksi perdagangan ekspor maupun impor ketiga negara sudah harus menggunakan mata uang lokal dan mengurangi penggunaan dolar sebagai mata uang internasional. (bi.go.id, 2017)

Kesepakatan kerjasama ini sudah mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 dan ketiga negara Indonesia Malaysia Thailand sepakat menggunakan mata uang lokal dan tidak lagi menggunakan dolar sebagai alat tukar pembayaran di masing-masing negara, dan juga menggunakan mata uang local sebagai penggantinya. (bi.go.id, 2017)

Kebijakan LCS ini berangkat dari keinginan Indonesia Malaysia dan Thailand untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Indonesia sebagai negara pertama yang menginisiasi kebijakan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi transnasional menggandeng negara mitra yaitu Malaysia dan Thailand untuk bersama-sama sepakat dan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor dan mengurangi penggunaan dolar. (nasional.kontan.co.id, 2018)

Diketahui dalam pembuatan kebijakan ini ketiga negara menunjuk tujuh bank yang yang dinilai mampu untuk memfasilitasi kebijakan ini antara lain Bank BNI, Bank BCA, Maybank, dan Bangkok Bank. Sedangkan yang belum melakukan adalah Bank Mandiri, Bank BRI, dan CIMB Niaga, dari beberapa bank yang dinilai mampu untuk memfasilitasi kerjasama tersebut dibentuklah satu bank yang bernama ACCD (Appointed Cross Currency Dealer) untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : hadi.skeleton@gmail.com

pembukaan rekening mata uang negara mitra di masing-masing negara. (nasional.kontan.co.id, 2018)

Melihat dari segi penggunaan dolar yang sangat massif, berbagai negara telah melakukan upaya untuk mulai perlahan meninggalkan dolar sebagai uang transaksi kerjasama perdagangan dan menggantinya dengan mata uang lokal dalam berbagai hubungan dagang dan kerjasama ekonominya. Berbagai negara telah sadar akan resiko yang diakibatkan oleh hegemoni dan pengaruh dolar yang berfluktuatif, terlebih apabila terjadi guncangan yang mengakibatkan berbagai resiko seperti yang pernah dialami berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Terdapat beberapa negara yang sudah mulai mengurangi penggunaan dolar ialah Rusia - Turki, India - Iran, India - UEA, Rusia-Suriah. (indopos.co.id, 2018)

Upaya ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengurangi ketergantungan dan menghindari adanya resiko-resiko yang pernah terjadi di berbagai negara yang diakibatkan oleh pengaruh dolar di dunia. Indonesia Malaysia dan Thailand juga ingin ikut untuk mengurangi penggunaan dolar AS dan menggantinya dengan menggunakan mata uang lokal dalam kerjasama ekonomi ketiga negara, lalu dibuatlah kerangka kerjasama LCS yang disepakati Indonesia Malaysia dan Thailand.

Namun, dalam peluncuran kerjasama LCS ini menurut beberapa ahli ekonom beresiko, dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia Malaysia dan Thailand apabila benar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan dolar dikawasan transregional tersebut, adapun permasalahan-permasalahan yang akan muncul diantaranya

1. Untuk menggunakan mata uang nasional, tidak akan langsung memberikan hasil yang signifikan. Dibutuhkan penggunaan secara luas dengan prospek jangka menengah dan panjang. Vladimir Burlachkov mengatakan prospek transisi ke mata uang nasional dalam perhitungan antara kedua negara masih ambigu. Perhitungan dalam mata uang nasional menyebabkan permintaan permintaan pada produk-produk perekonomian nasional, ujar seorang profesor dari Departemen Keuangan Universitas Ekonomi Negeri Moskow Plekhanov, Vladimir Burlachkov, dan di khawatirkan Indonesia akan mengalami hal yang sama karena rupiah Indonesia itu posisinya sebagai mata uang tidak terlalu kuat sehingga apa yang dikatakan Vladimir Burlachkov ada kemungkinan akan terjadi di Indonesia. (id.rbth.com, 2015)
2. Menurut anggota Komite Kebijakan Moneter dan sekaligus pakar dari “Delovaya Rossiya” Dmitry Golubovskiy mengatakan “Kesulitan berkaitan dengan volatilitas (besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pasar pada satu periode tertentu) mata uang nasional yang tinggi dan ketergantungan pada situasi di pasar komoditas dunia. Dengan demikian, perhitungan dalam mata uang ini berkaitan dengan risiko yang tinggi”. (id.rbth.com, 2015)
3. Menurut kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Samuel ‘Untuk meninggalkan dolar sebagai alat transaksi internasional cukup berbahaya bagi importir yang melakukan kerjasama dengan Indonesia dan juga akan mengganggu minat investasi asing di negara Indonesia’. (youtube.com, 2018)
4. Mengenai pelaksanaan transisi pada perhitungan lintas mata uang sebaiknya dilakukan dalam jangka 5–6 tahun karena keinginan untuk bertemu dalam waktu singkat dapat menyebabkan dampak yang tak terduga. Ujar Direktur umum dari perusahaan manajemen PERAMO Olga Meshcheryakova.

Hal yang sama jika dilihat dari keputusan tersebut dinilai sangat cepat dan tidak melalui proses penelitian yang maksimal dan dinilai terlalu terburu-buru dan tidak melalui proses pembicaraan dan proses tahapan.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai alasan atau tujuan pemerintah Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi atau perdagangan transnasional

Kerangka Teori

Kerjasama Ekonomi Internasional

Meningkatnya hubungan antar negara pada masa ini, sangat teat rasanya menggunakan Teori Kerjasama Internasional dalam penelitian ini, karena Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masingmasing. (Zulkifli, 2014)

Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan social ekonomi yang lebih menyita perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional. (Zulkifli, 2014)

Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. (Zulkifli, 2014)

Dari pengaturan substansinya, dapat dibedakan dalam dua kategori berupa Law making treaties, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. (Zulkifli, 2014)

Sedangkan perjanjian internasional yang digolongkan sebagai *treaty contracts* mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian internasional yang tergolong *treaty contracts* tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. (Zulkifli, 2014)

Perkembangan pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional. Adanya implementasi suatu perjanjian interna-sional pada peraturan perundang-undangan nasional dimaksudkan agar suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan dalam suatu negara. Dengan kata lain, perlu ada suatu pengundangan khusus atau peraturan pelaksanaan (implementing legislation) untuk menerapkan isi perjanjian internasional dalam hukum Indonesia. Mieke Komar Kantaatmadja mengemukakan bahwa:

“...Tanpa adanya perundangundangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dimana Indonesia telah menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya...”

Terkait kewajiban untuk melakukan transformasi suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional karena adanya tujuan perjanjian internasional yang berkategori law making untuk merubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa perjanjian internasional yang bersifat law-making maka negara memiliki kewajiban untuk menternjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara Barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyedia-kan informasi dan mengurangi biaya. Instituis-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama. (Sorensen, 2005)

Disamping itu, kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi K. mengatakan bahwa kerjasama interna-sional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia (Hikmahanto, 2010) Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya International Politics, A Framework for Analysis juga berpendapat bahwa:

“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics”.

Mencermati Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat.

Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap

persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen. (Sjamsumar Dam & Riswandi, 1995)

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, Kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa Tujuan Indonesia Malaysia Thailand Menghunakan Mata Uang Lokal Dalam Transaksi Transnasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dianalisa oleh penulis sebagai sumber informasi dan referensi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Local Currency Settlement Framework

Local Currency Settlement Framework adalah penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelah transaksi dilakukan di dalam yurisdiksi di masing-masing negara.

Local Currency Settlement Framework dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tekanan nilai tukar mata uang terhadap Dolar Amerika Serikat. Kemudian, kesepakatan ini menyebabkan efisiensi biaya transaksi karena perbankan bisa langsung membeli mata uang negara tujuan tanpa perlu membeli dolar terlebih dahulu. (hukumonline.com, 2019) Serta kerangka kerjasama untuk sepakat menggunakan mata uang lokal dalam melakukan transaksi ekspor maupun impor dalam transaksi transnasional.

Bank Indonesia (BI) bersama Bank Sentral Thailand dan Bank Negara Malaysia sepakat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar Amerika Serikat (AS). Ini terutama dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara mitra.

Oleh karena itu, BI menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/11/PBI/2017. Demikian mengutip dari laman Bank Indonesia, pada 17 Oktober 2017. Pengaturan *local currency settlement* (LCS) bertujuan untuk mendukung kestabilan nilai tukar rupiah, ringgit dan bath dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS. Melalui peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi valas terhadap rupiah dengan terjadinya kuotasi harga secara langsung antara rupiah dengan beberapa mata uang negara mitra. Dengan begitu, pasar mata uang regional dapat berkembang. Selain itu, hal ini juga

dapat memperkuat akses pelaku usaha untuk membayar kewajibannya dalam mata uang lokal.

Penerbitan PBI ini merupakan tindak lanjut penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia pada 23 Desember 2016. Dalam MoU itu sepakati kerja sama LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam penyelesaian perdagangan internasional antara ketiga negara itu dengan menggunakan mata uang lokal, yaitu rupiah, ringgit, dan baht. (liputan6.com, 2018)

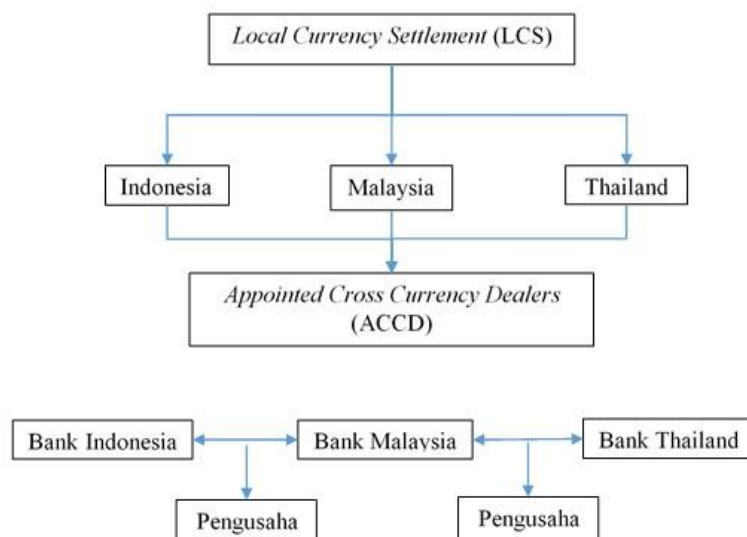
Setelah penandatanganan MoU yang dilakukan Bank Indonesia, Bank Malaysia, dan Bank of Thailand sudah mulai berlaku tepatnya pada tanggal 2 Januari 2018. (bi.go.id, 2017)

Mekanisme Pelaksanaan *Local Currency Settlement Framework*

Dalam pelaksanaannya, LCS akan dilakukan melalui Bank umum. Ketentuan ini menghasilkan peraturan tentang pelaksanaan dan transaksi keuangan yang dapat dilakukan oleh Bank yang ditunjuk sebagai Dealer mata uang silang (ACCD). Bank ACCD yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dan Bank sentral negara mitra akan menerima sejumlah fasilitas dan transaksi keuangan di pasar valas seperti membuka rekening dimata uang lokal dan negara mitra, transaksi rupiah terhadap mata uang negara mitra, pembiayaan perdagangan dalam mata uang negara mitra dan dana transfer untuk kepentingan pelaksanaan LCS.

Penulis ingin memberikan alur yang menggambarkan mekanisme pemanfaatan kerangka kerjasama LCS di tiga negara untuk memperjelas bagaimana dari pelaku usaha baik masyarakat ataupun investor dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di tiga negara yang di dukung atau di fasilitasi oleh bank ACCD di masing-masing negara.

Gambar 1. Bagan Alur *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD) Dalam *Local Currency Settlement* (LCS)



Sumber: Diolah penulis, 2020

Dari kebijakan yang telah disepakati oleh ke tiga negara tersebut peneliti ingin mengetahui mengapa ketiga negara ingin menggunakan mata uang lokal di tiga negara sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dalam transaksi transnasional.

Mengurangi Ketergantungan Mata Uang Dolar Amerika

Ketergantungan terhadap dolar AS adalah kondisi dimana perekonomian negara-negara masih bergantung pada negara adidaya (Amerika). Dalam keadaan ini, Amerika Serikat mampu mempengaruhi kondisi nilai tukar mata uang di berbagai negara, seperti menguat atau melemahnya nilai tukar mata uang. Hal itu dikarenakan ketergantungan suatu negara dalam melakukan transaksi menggunakan mata uang dolar AS. (berkas.dpr.go.id, 2018)

Kepentingan Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini yaitu ingin mengurangi ketergantungan mata uang dolar ialah untuk menghindari apabila terjadi fluktuasinya nilai dolar yang membuat harga-harga kebutuhan melambung tinggi yang mengganggu arus perdagangan transaksi ekspor dan impor khususnya di tiga negara.

Belajar dari kasus 1998 yang membuat mata uang diberbagai negara di dunia khususnya Indonesia Malaysia dan Thailand megalami anjloknya nilai mata uang mereka diakibatkan pengaruh nilai dolar yang ketika itu melambung tinggi. Melambungnya nilai Dolar ketika itu membuat barang-barang didalam negeri juga ikut mengalami kenaikan, penyediaan barang lokal juga ikut meningkat. Hal ini yang membuat mata uang lokal menjadi jatuh atau anjlok.

Hal ini yang membuat Indonesia, Malaysia, dan Thailand membuat kesepakatan sebuah kerangka kerjasama LCS untuk sepakat bersama-sama mengurangi ketergantungan dolar dalam melakukan transaksi perdagangan dan menggunakan mata uang lokal sebagai alat ganti transaksi dimasing-masing negara sebagai penggantinya. (bi.go.id, 2017)

Memudahkan dan Meningkatkan Volume Ekspor dan Impor di Tiga Negara

Ketiga negara meluncurkan sebuah kerangka kerjasama LCS yang dimana dalam kerjasama tersebut memberikan manfaat lebih bagi ketiga negara Manfaat yang diberikan dalam kerangka kerjasama LCS ini bagi Indonesia, Malaysia dan Thailand ialah memberikan biaya Hedging lebih rendah. Menurut Nanang Hendarsah, (Direktur Eksekutif Departmen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia) salah satu keuntungan menggunakan LCS adalah biaya hedging yang dikeluarkan pengusaha akan lebih rendah dalam menggunakan skema LCS dalam aktifitas transaksi ekspor impor di banding menggunakan dolar AS. Biaya premi Forward dapat lebih rendah jika dibandingkan dengan premi Forward ke USD. (kompas.id, 2018)

Maksud dari biaya Hedging lebih rendah ialah skema pembayaran harga yang sudah di tetapkan tetapi dalam pembayarannya dalam waktu yang panjang. Dengan biaya hedging yang rendah, kuota harga ringgit (MYR) Rupiah (IDR) atau baht Thailand (THB) bisa dilakukan secara langsung. Dengan ketentuan ini, para pengusaha tidak perlu lagi menukar rupiahnya terlebih dahulu ke dalam mata uang dollar AS.

Tak hanya itu, likuiditas valuta asing di kawasan Asia Tenggara juga akan lebih terjamin dibanding dolar AS. Instrumen mata uang di Asia Tenggara ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif investasi, selain dollar AS pasca berlakunya ketentuan LCS. Melihat dari manfaat yang diberikan dari kerjasama LCS ini masing-masing negara melakukan peningkatkan transaksi perdagangan ekspor impor antara Indonesia

Malaysia dan juga Thailand karena transaksi ini dinilai sangat tinggi dikawasan ASEAN.

Harapan dari kerjasama LCS Framework ini, mata uang lokal (rupiah, ringgit dan baht) dapat lebih sering digunakan oleh masyarakat dalam setiap melakukan transaksi pembayaran di tiga negara. Sehingga ketergantungan negara terhadap mata uang amerika (USD) dalam perdagangan baik bilateral maupun trilateral dapat dikurangi. (goodnewsfromindonesia.id, 2018)

Bank Indonesia (BI) menyebutkan, pada awal Februari 2018 sudah terdapat enam perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan mata uang lokal atau *local currency settlement* (LCS) dalam transaksi perdagangan antar negara. (republika.co.id, 2018) Hampir seluruh bank yang dianggap mampu untuk memfasilitasi kebijakan tersebut sudah menyiapkan infrastruktur, untuk berlangsungnya kerjasama tiga negara ini.

Adapun bidang usaha perusahaan tersebut yang menggunakan LCS yakni importir makanan tekstil, hingga suku cadang kendaraan bermotor. Implementasi fasilitas LCS dengan skema *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD) sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Pada pertengahan November 2018, total *Outstanding settlement* perdagangan dengan mata uang lokal masing-masing tercatat Bath (THB) mencapai 1,3 Miliar, RM 394 juta, dan Rupiah 111 Miliar. (kontan.co.id, 2018)

Peningkatan total transaksi perdagangan melalui LCS terus-menerus menunjukkan peningkatan. Total transaksi perdagangan melalui kerjasama LCS terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan Bath (THB) mencapai 13 Juta dolar Amerika Serikat (setara Rp185 Miliar) atau 402 juta dalam THB, meningkat dibandingkan di priode yang sama pada tahun 2018 sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat (setara Rp96 Miliar). Sementara untuk transaksi LCS menggunakan Ringgit (MYR) mencapai 70 juta dolar Amerika Serikat (setara Rp.1 Triliun), meningkat lebih tinggi dibandingkan priode yang sama pada tahun 2018 sebesar 6 juta dolar Amerika Serikat (setara Rp.83 Miliar). (tirto.id, 2019)

Harapannya dalam kerjasama ini ketiga negara terus menggunakan mata uang nasionalnya guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan menjadi contoh bagi negara lingkup ASEAN untuk menggunakan mata uang nasionalnya dalam melakukan transaksi antar negara secara lebih besar dalam melakukan perdagangan di lintas negara

Kemudahan Bertransaksi Bagi Sektor Ritel Di Tiga Negara Dengan Menggunakan Mata Uang Lokal

Sebelum adanya kerangka kerjasama LCS ini masyarakat di tiga negara melakukan transaksi perdagangan menggunakan mata uang dolar dalam sistem pembayarannya. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan waktu lebih untuk melakukan konversi uang mereka dalam bentuk dolar. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa menggunakan dolar dalam transaksi perdagangan.

Dengan adanya kerangka kerjasama LCS ini masyarakat dapat mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan antar tiga negara. Dalam hal ini yang dimaksud dalam kemudahan transaksi ialah dimana kondisi masyarakat dapat membelanjakan mata uang lokal tiga negara Rupiah, Ringgit dan Bath Thailand dapat berlaku dan di terima dengan bebas dimana saja dan kapan saja dengan siapa saja, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Dengan menggunakan mata uang lokal di tiga

negara akan memberikan kemudahan salah satunya dalam transaksi antar negara tidak lagi harus mengkonversikan ke dolar Amerika, apalagi bagi masyarakat yang melakukan transaksi pembayaran di tiga negara sebelum adanya LCS ini harus mengikuti nilai dolar yang fluktuatif yang mengharuskan masyarakat menambah biaya apabila dolar sedang naik nilainya.

Dampak baik dari kemudahan ini dapat dilihat dari transaksi ritel di tiga negara. Sebagai contoh, di Malaysia sudah banyak tempat-tempat yang menerima mata uang rupiah dan bath dalam transaksi jual beli seperti toko cindramata di Malaysia menerima pembayaran rupiah dan bath, mulai dari toko baju, makanan, coklat, bahwa di pusat perbelanjaan seperti Mall. Selanjutnya, sebagai contoh di Thailand Kemudahan bertransaksi yang berada di tempat wisata Watarun khususnya, membuat menarik minat banyak turis lokal dan mancanegara berkunjung ketempat tersebut, selain itu juga masyarakat disana dapat dikatakan fasih berbahasa Indonesia dan Inggris tak terkecuali para pedagang yang ada di Watarun.

Hal ini memberikan dampak positif terhadap kemudahan penggunaan mata uang. Terlebih masyarakat terbantu untuk tidak repot lagi menukarkan uangnya ke bentuk dolar dan melakukan transaksi secara langsung menggunakan uang lokal yang berlaku.

Investasi Langsung Menggunakan Mata Uang Lokal

Selanjutnya ke tiga negara melakukan pelaksanaan kerangka kerjasama LCS ialah untuk mendorong minat investor untuk melakukan investasi secara langsung di tiga negara.

Pengertian Investasi langsung ini sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Pengertian penanaman modal langsung pada intinya menekankan kepada pengertian modal asing yang dilakukan para penanam modal asing secara perorangan. (tirto.id, 2019)

Maksud dan tujuan dibuatnya kerangka kerjasama LCS ini yaitu untuk mendorong Investor di tiga negara dan pelaku usaha agar dapat memanfaatkan kerjasama tersebut dengan melakukan investasi secara langsung di tiga negara. Investasi yang dilakukan disini ialah para pelaku usaha atau investor baik kelompok maupun perorangan dapat secara langsung mengelola investasi sendiri, dalam itu melakukan analisis, memilih saham dan mengambil keputusan investasi sendiri membeli atau menjual saham di tiga negara. (m.kontan.co.id, 2016)

Sejak berlakunya kerangka kerjasama LCS ini Bank Indonesia mencatat terjadi peningkatan *Net* kewajiban pada posisi investasi internasional (PII) Indonesia. Kenaikan ini disebabkan Finansial Luar Negeri (KFLN). Berdasarkan laporan PII Indonesia pada triwulan II-2019 mencatat terjadi peningkatan sebesar US\$ 330,3 Miliar atau sebesar 31,0% terhadap PDB. (nasional.kontan.co.id)

Hal ini disebabkan oleh besarnya aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung. Ada juga faktor pelemahan dolar AS terhadap rupiah yang menyebabkan adanya peningkatan nilai instrumen investasi berdominasi mata uang nasional atau rupiah. Sementara itu, posisi AFLN pada akhir kuartal III-2019 juga tumbuh sebesar 0,5% atay sebesar US\$ 1,9 miliar menjadi US\$ 361,0 miliar.

Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan transaksi prolehan AFLN dalam bentuk aset investasi langsung. Ada juga faktor dari kenaikan harga obligasi dan rata-rata indeks harga saham.

Melihat capaian tersebut, BI masih melihat bahwa perkembangan PII Indonesia pada kuartal ini masih sehat. Namun BI akan tetap terus mewaspadai terhadap resiko perekonomian Indonesia. Selanjutnya PII diperkirakan akan terus membaik sejalan dengan stabilitas ekonomi yang terjaga.

Kerjasama yang dilakukan ketiga negara ini membuahkan hasil yang memuaskan, terbukti sejak berlakunya kerangka kerjasama LCS terdapat peningkatan Investasi secara langsung ditiga negara.

Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan bahwa yang mendasari adanya sebuah kerangka kerjasama *Local Currency Settlement Framework* yang dimaksudkan untuk penguatan mata uang lokal di tiga negara, dengan cara pemberlakuan dan penggunaan uang nasional mereka dapat beredar luas di tiga negara. Hal ini tidak lain ialah untuk mengurangi pengaruh nilai dolar yang bisa mengalami penguatan dan bisa membuat mata uang lokal mengalami pelemahan, selain itu tujuan dari kerjasama ini adalah untuk sepakat menggunakan mata uang lokal dalam melakukan transaksi ekspor dan impor dimasing-masing negara baik Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Manfaat yang diberikan dari kerangka kerjasama LCS ini ditujukan bagi pelaku investor di tiga negara dimudahkan dengan biaya hedging yang lebih rendah. Biaya hedging yang dikeluarkan pengusaha akan lebih rendah dalam menggunakan skema LCS dalam aktifitas transaksi ekspor impor di banding menggunakan dolar AS. Biaya premi Forward dapat lebih rendah jika dibandingkan dengan premi Forward ke USD

Selain itu, dalam kebijakan kerjasama LCS ini salah satunya juga memberikan alternative investasi yang dimana investor tidak melulu melakukan investasi dengan menggunakan mata uang dolar. Dan mendorong minat investor untuk melakukan investasi menggunakan uang nasional di tiga negara.

Investor dapat melakukan investasi secara langsung dengan menggunakan mata uang nasional mereka yang berlaku di tiga negara. Investasi yang dilakukan disini ialah para pelaku usaha atau investor baik kelompok maupun perorangan dapat secara langsung mengelola investasi sendiri, dalam itu melakukan analisis, memilih saham dan mengambil keputusan investasi sendiri membeli atau menjual saham di tiga negara.

Daftar Pustaka

- Begini perkembangan local currency swap dengan Malaysia dan Thailand, <http://amp.kontan.co.id/news/begini-perkembangan-local-currency-swap-dengan-malaysia-dan-tailand>
- Begini perkembangan local currency swap dengan Malaysia dan Thailand, <http://amp.kontan.co.id/news/begini-perkembangan-local-currency-swap-dengan-malaysia-dan-tailand>
- BI: Net kewajiban posisi investasi internasional tumbuh di kuartal II-2019 <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-net-kewajiban-posisi-investasi-internasional-tumbuh-di-kuartal-ii-2019>
- Empat Bank Sentral ASEAN Berkomitmen Dorong Local Currency Settlement Framework, <http://stabilitas.co.id/home/detail/bank-central-indonesia-malaysia-thailand-dan-filipina-berkomitmen-dorong-Local-Currency-Settlement-Framework>

- Enam negara tidak gunakan dolar .<https://indopos.co.id/read/2018/12/17/159052/enam-negara-tidak-gunakan-usd>
- Hikmahanto Juwana, 2010. Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai negara berkembang, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Indonesia, Malaysia, Thailand Sepakat Tak Lagi Gunakan Dolar AS untuk Perdagangan. Ini Manfaatnya, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/04/indonesia-malaysia-thailandsepakat-tak-lagi-gunakan-dolar-as-untuk-perdagangan-ini-manfaatnya>
- Ini Upaya BI untuk Mengurangi Ketergantungan Terhadap Dolar, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/03/14/p5kq7e377-ini-upaya-bi-untuk-mengurangi-ketergantungan-terhadap-dolar>
- Investasi langsung atau tidak langsung, https://m.kontan.co.id/news_kolom/678/investasi-langsung-atau-tidak-langsung
- Mengenal Kebijakan *Local Currency Settlement Framework* dalam Transaksi Perdagangan Bilateral <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5caddbc1f2c0d/mengenal-kebijakan-i-local-currency-settlement-dalam-transaksi-perdagangan-bilateral/>
- Mulai 2 Januari 2018, 3 Negara ASEAN Sepakat Kurangi Pemakaian Dolar AS <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3859465/mulai-2-januari-2018-3-negara-asean-sepakat-kurangi-pemakaian-dolar-as>
- Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Dan Fundamental EKONOMI INDONESIA, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-6-II-P3DI-Maret-2018-206.pdf
- Robert J.,G. Sorensen, 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sepakat! RI, Malaysia dan Thailand Kurangi Transaksi Dolar Amerika Serikat <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp-11122017.AmerikaSerikatpx>
- Siapkah Indonesia dan Rusia Gunakan Mata Uang Nasional dalam Perdagangan https://id.rbth.com/economics/2015/11/20/siapkah-indonesia-dan-rusia-gunakan-mata-uang-nasional-dalam-perdagangan_542621
- Sjamsumar Dam & Riswandi, 1995. Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Transaksi ekspor impor dengan sistem pembayaran local currency settlement masih sepi <https://nasional.kontan.co.id/news/transaksi-ekspor-impor-dengan-sistem-pembayaran-local-currency-settlement-masih-sepi>
- Transaksi Ekspor Impor ke Malaysia dan Thailand Lebih Untung dengan “Local Currency Settlement” https://kompas.id/baca/adv_post/transaksi-ekspor-impor-ke-malaysia-dan-thailand-lebih-untung-dengan-local-currency-settlement/
- Transaksi LCS dengan Malaysia-Thailand Capai Rp. 1,18 T di awal 2019, <https://tirto.id/transaksi-lcs-dengan-malaysia-thailand-capai-rp118-t-di-awal-2019-dlgT>
- Youtube. “RUPIAH RONTOK, Jokowi CEMAS”. LN News <https://www.youtube.com/watch?v=YnYIPdfJdds&feature=youtu.be>.
- Zulkifli, 2014. Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, Program Studi Hukum, Universitas Pasir Pengaraian email: zulkifli.mansur@gmail.com